



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARFI IRAWATI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 840766

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/173 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 1650 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 SL Tahun 2007, WARISAN Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.282.732

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.283.282.732

III. HUTANG Rp. 31.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.251.682.732

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.